

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rasyid Thalib. (2006). *“Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”* Cetakan Ke I. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fadiil, Achmad Edi, Anna Triningsih. (2020). *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.”* Depok; Rajagrafindo Persada.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Anwar Usman. (2020). *“Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia.”* Rajawali Pers.
- Benny K. Harman. (2013). *“Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD.”* Cetakan Pertama. Jakarta; PT Gramedia.
- Danang Wijayanto, et al. (2018). *“Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.”* Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. (2019). *“Hukum Tata Negara Indonesia,”* Jakarta; Prenadamedia Group.
- I Gusti Bagus Suryawan. (2010). *“Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum.”* Yogyakarta; Publik Global Media.
- Irwansyah. (2021). *“Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.”* Edisi Revisi. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2017). *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.”* Bandung; Afabeta.
- Janpatar Simamora. (2013). *“Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Riview di Indonesia.”* Cetakan Pertama. Yogyakarta; Capiya Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.”* Jakarta; Rajawali Pers.
- (2010). *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.”* Jakarta; Sinar Grafika.

- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. (2016). *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.”* Depok; Prenadamedia Group.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2007). *“Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan.”* Jakarta; Komisi Yudisial.
- (2018). *“Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman.”* Cetakan Pertama. Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Mahkamah Agung RI. (2010). *“Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.”*
- Miriam Budiardjo. (2008). *“Dasar-Dasar Ilmu Politik.”* Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi Golap. (2019). *“Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *“Penelitian Hukum, Prenadamedia Group.”* Jakarta.
- Ridwan HR. (2014). *“Hukum Administrasi Negara.”* Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2008). *“Pengantar Penelitian Hukum.”* Jakarta; UI Press.
- Sri Mamudji. (2011). *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.”* Jakarta; Raja Grafindo.

JURNAL

- Achmad Irwan Hamzani. (2014). *“Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.”* Jurnal Yustisia. Vol. 3, Nomor 3.
- Choky R. Ramadhan. (2018). *“Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Pembentukan Hukum.”* Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 30, Nomor 2.
- Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi. (2022). *“Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”* Jurnal Ilmu Hukum Reusam. Vol. 9.
- Efi Yulistiyowati, et al. (2016). *“Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.”*

- Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, nomor 2.
- Fais Yonnas Bo'a. (2020). *"Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Tegaknya Cita Hukum (Rechts Idee) Pancasila Dalam Bernegara."* Jurnal Arena Hukum. Vol. 13.
- Fauziah Yumna dan Rahayu Subekti. (2022). *"Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia."* Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol. 1, Nomor 3.
- Haposan Siallangan. (2016). *"Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia."* Jurnal Sosiohumaniora. Vol 18, Nomor 2.
- Idul Rishan. (2016). *"Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia."* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 23, Nomor 2.
- Ismail Rumadan. (2014). *"Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)."* Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 3, Nomor 3.
- Junpantar Simamora. (2014). *"Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Jurnal Dinamika Hukum. Vol, 14 Nomor 3.
- Mohammad Faisal Ridho. (2017). *"Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia."* Jurnal ADALAH:Buletin Hukum & Keadilan. Vol. 1, Nomor 8.
- Ramli, dkk.(2019). *"Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum."* Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 10, Nomor 2.
- Rika Marlina. (2018). *"Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia."* Jurnal Daulat Hukum. Vol 1, Nomor 1.
- Shandi Patria Airlangga. (2009). *"Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis."* Jurnal Cepalo. Vol, 3, Nomor 1.
- Simabura Charles. (2009). *"Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim."* Jurnal Konstitusi. Vol. 6, Nomor 2.
- Sunarto. (2016). *"Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."* Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol 45, Nomor 2.
- Wahyudi Kumorotomo, (2015). *"Memperbaiki Mekanisme Kawal Dan Imbang (Checks And Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah."* Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol 11, Nomor 1.
- Zaherman Armandz Muabezi. (2017) *"Negara Berdasarkan Hukum"*

(Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 6, Nomor 3.

ARTIKEL

Anonim. Pemberhentian Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan. <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-Mahkamah-Konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>.(diakses pada 14 juni 2023)

CNN Indonesia. Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-darijabatan-hakim-konstitusi>.(diakses pada 14 juni 2023).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-putusan-mk-diubah-pemohon-minta-pelaku-dipecat-tidak-hormat-lt63d723e701061/>
(diakses pada 14 juni 2023).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>, (diakses tanggal 31 agustus 2023).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 103/PPU-XX/2020 Tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.